

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah, apabila terjadi perubahan terhadap 2 faktor tersebut akan berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020 difokuskan pada Pemantapan Daya Dukung Pembangunan Seluruh Sektor Dengan Mengedepankan Pengelolaan Kota Berkelanjutan. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2020 ini tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2018, serta target tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Sebagaimana diketahui Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,5% pada 2020 dalam asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2020-2022 di dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2019. Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik selama lima tahun terakhir, perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah.

Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian Amerika Serikat menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika

likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia. Selain itu hal-hal yang perlu diwaspadai adalah adanya perlambatan ekonomi China yang saat ini mendominasi perekonomian global sehingga dapat mempengaruhi perlambatan harga komoditas dan rendahnya produktivitas global. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya *supply constrains* karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii) permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan *skill gap* antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,1% secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini mengingat tantangan dan resiko global seiring dengan perkembangan dan transformasi digital serta industri 4.0 (dan menuju industri 5.0), meningkatnya penduduk lanjut usia serta perubahan iklim dan bencana. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan. Hal ini juga perlu didorong dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan upaya pengurangan risiko perubahan iklim dan bencana.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Penekanan tahapan pembangunan lima tahun keempat (2018-2023) Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Perekonomian Kalimantan Timur dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan khususnya mampu mengurangi kebergantungan pada sumber daya alam primer. Oleh karena itu, pada RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan menjadi salah satu isu strategis harus diselesaikan dengan dukungan sektor-sektor lainnya. Adapun kerangka makro ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Balikpapan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	1,78	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
Inflasi	2,75	3,61±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1
Kemiskinan	6,19	6,10	6,01	5,98	5,96	5,50
PDRB per kapita (000 Rp)	165.714,16	170.800	173.455	175.605	179.330	181.113
Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,75	64,65	65,23	66,50	67,20	70,00
Tingkat pengangguran terbuka	6,91	6,87	6,80	6,75	5,75	5,00
Persentase PAD terhadap pendapatan	53,48%	51,48	54,93	55,99	57,04	57,74
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	7,96	8,00	8,20	8,3	8,4	8,5
Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	4,49	4,90	5,45	5,90	6,20	6,70

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi sub sektor perikanan PDRB						
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,30	5,55	5,80	6,00	6,20	6,50
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18,57	19,21	20,22	21,45	23,22	24,10
Pertumbuhan Industri	3,47	5,60	5,70	6,20	6,50	7,00

Sumber : Ranwal RPJMD Kaltim Tahun 2018-2023

Untuk mencapai kerangka ekonomi makro di atas, pembangunan Kalimantan Timur di Tahun 2020 difokuskan pada pengembangan kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi dengan strategi pertumbuhan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada kawasan-kawasan strategis yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan berbasis kepada sektor-sektor unggulan masing-masing kawasan strategis yang didukung oleh daya saing infrastruktur dasar (konektivitas, energi dan air baku).

Sesuai dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 ditargetkan tumbuh 2,75-3,25% yang diharapkan dapat disokong oleh pertumbuhan ekspor dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal ini didasarkan atas keyakinan masih tingginya permintaan di pasar internasional.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan, yakni Kota Balikpapan sebagai Kota yang Terkemuka, Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman. Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJM Kota Balikpapan tahun 2016-2021 untuk mencapai sasaran pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yakni:

1. peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri;
2. pengembangan jaringan distribusi dan keamanan perdagangan;
3. pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata berwawasan lingkungan;
4. peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global;
5. meningkatkan produksi pertanian, unggulan perkebunan, peternakan dan perikanan.

Memperhatikan arah kebijakan tersebut di atas serta guna menopang arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2020 diarahkan pada:

1. percepatan pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Sentra Industri Kecil di Somber dan Teritip;
2. penguatan momentum pertumbuhan industri kreatif serta pengembangan potensi UMKM;
3. penguatan kalender event pariwisata serta sarana-prasarana dalam rangka mendukung fungsi sebagai Kota MICE;
4. mendorong investasi di semua sektor dalam rangka membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun mendatang diperkirakan optimis tumbuh meningkat lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Meskipun demikian, laju peningkatannya diperkirakan masih menghadapi tantangan seiring dengan pertumbuhan Nasional dan Kalimantan Timur yang juga mengalami penyesuaian terhadap perekonomian global yang masih belum stabil. Kondisi perekonomian global yang terus menunjukkan perbaikan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5% hingga 6,0%. Sementara tingkat inflasi Kota Balikpapan pada 2020 diharapkan dapat terkendali dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,5 \pm 1\%$.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang diperkirakan tetap tumbuh optimis didorong oleh kekuatan perekonomian Kota Balikpapan yang mayoritas ditopang oleh

tingginya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan diiringi dengan tingginya daya beli masyarakat menjadi kekuatan yang dimiliki Kota Balikpapan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Selain peran konsumsi rumah tangga, semakin membaiknya belanja pemerintah dan investasi diperkirakan turut mampu mendorong produktivitas dan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Besarnya nilai tambah pada kategori lapangan usaha konstruksi serta transportasi dan pergudangan sejalan dengan keberadaan Kota Balikpapan sebagai kota jasa dimana pada sektor ini memiliki laju pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Sementara peningkatan pada kategori lapangan usaha industri pengolahan yang sangat dipengaruhi oleh Unit Pengolahan Minyak PT. Pertamina (Persero) yang sesuai dengan pola tahunannya maka pada tahun 2020 diperkirakan turut mendorong kinerja lapangan usaha di Kota Balikpapan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan secara terukur rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah:

- a) mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah;
- b) membuat *database* dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD;

- c) menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
- d) pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- e) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
- f) mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- g) meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h) meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- i) melakukan Migrasi Sistem Pelayanan dari Sistem yang lama ke SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan Sistem Aplikasi yang telah dipakai oleh Dirjen Pajak dalam mengelola PBB sampai tahun 2012 (tahun pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah). Kedepannya SISMIOP ini dapat dikembangkan dari saat ini berbasis dekstop menjadi berbasis web. Sehingga Wajib Pajak Dapat mengakses datanya melalui web secara online;
- j) workshop Penilaian Individu Objek Khusus bekerjasama dengan Kanwil DJP Kaltim. Objek Khusus berbeda Objek PBB yang ditetapkan secara Massal. Dari sisi nilai pemanfaatannya secara ekonomis membuat NJOP objek khusus lebih tinggi dari NJOP PBB yang ditetapkan. Serta mengadakan workshop penilaian objek khusus antara lain terhadap objek Apartemen/Hotel, Kilang Pertamina, Mall, Menara BTS, Bandara, Pelabuhan, Pabrik, Gudang/workshop, SPBU, Kantor dan Rumah Sakit;
- k) melakukan kegiatan pemetaan 3 Dimensi dengan melakukan survei objek pajak PBB di sebagian wilayah kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota (21 Kelurahan). Melakukan Updating peta ZNT (Zona Nilai Tanah);
- l) melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Balikpapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pokok

perubahan yang diajukan diantaranya mengenai penurunan tarif pengenaan pajak PBB-P2 terkait rencana kenaikan NJOP Bumi sesuai harga pasar untuk keperluan BPHTB;

- m) melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi dan lain-lain;
- n) melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas obyek pajak (uji petik).

Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (Tahun 2020)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	612.300.113.259,97	542.998.868.197,00	710.000.000.000,00	675.238.922.000,00	711.737.440.000,00
1.1.1.	Pajak Daerah	450.213.740.232,52	474.993.323.176	521.320.862.000,00	501.660.000.000,00	531.800.000.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	47.557.809.079,52	55.064.970.513	77.279.138.000,00	56.442.500.000,00	56.842.500.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.163.120.190,93	6.884.333.478,00	11.500.000.000,00	12.241.422.000,00	12.955.190.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	86.895.269.808,00	98.000.000.000,00	99.900.000.000,00	104.895.000.000,00	110.139.750.000,00
1.2.	Dana Perimbangan	984.655.776.388,00	1.040.717.582.926,00	1.195.993.286.000,00	1.140.756.884.400,00	1.197.794.728.621,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	440.417.956.526,00	542.723.135.277,00	640.616.467.000,00	672.647.290.350,00	706.279.654.868,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	392.620.000.000,00	410.543.293.000,00	445.818.661.000,00	468.109.594.050,00	491.515.073.753,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	61.617.819.862,00	87.451.154.649,00	109.558.158.000,00	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	373.383.258.000,00	406.184.172.000,00	558.405.722.865,00	368.804.838.000,00	382.122.935.000,00
1.3.1.	Hibah	2.600.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	234.528.619.000,00	272.682.284.000,00	273.104.144.865,00	285.132.846.000,00	298.450.943.000,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.982.139.000,00	79.672.476.000,00	80.671.992.000,00	80.671.992.000,00	80.671.992.000,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	52.272.500.000,00	50.829.412.000,00	92.350.000.000,00	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		1.867.868.973.698,97	2.081.844.382.093,00	2.464.399.008.865,00	2.184.800.644.400,00	2.291.655.103.621,00

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2020 disesuaikan dengan tema Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020 yaitu “Pemantapan Daya Dukung Pembangunan Seluruh Sektor dengan mengedepankan Pengelolaan Kota Berkelanjutan” sesuai dengan kebijakan “money follow program”. Pemanfaatan belanja daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu pengelolaan belanja daerah didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk belanja pegawai tetap menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi yang terintegrasi dengan kinerja instansi pemerintah daerah (LKjIP). Proyeksi belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal juga memperhatikan inflasi yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 3,13%.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan (2019)	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana (2020)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
2.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>					
2.1.1	Belanja Pegawai	574.721.273.231,75	726.387.818.546,00	771.971.639.000,00	815.146.359.400,00	856.423.981.871,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	67.248.807.434,00	68.336.760.377,00	78.927.676.844,00	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	117.323.700,00	1.092.093.800,00	2.347.501.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa*	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa*	1.076.238.488,00	998.806.796,00	3.085.000.000,00	1.117.550.000,00	1.117.550.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	177.850.000,00	3.456.134.384,00	32.139.301.762,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	644.341.492.853,75	801.071.613.903,00	889.471.118.606,00	898.263.909.400,00	939.541.531.871,00
2.2	<i>Belanja Langsung</i>					
2.2.1	Belanja Pegawai	239.413.283.024,00	166.439.929.778,00	245.660.822.040,00	253.030.647.000,00	265.682.179.350,00
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	425.034.424.787,00	415.020.518.961,00	650.011.224.777,00	359.671.319.000,00	377.654.884.950,00
2.2.3	Belanja Modal	451.891.556.091,00	595.284.471.211,00	652.630.843.442,00	672.209.769.000,00	705.820.257.450,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.116.339.263.902	1.176.744.919.950	1.548.302.890.259,00	1.284.911.735.000,00	1.349.157.321.750,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.760.680.756.755,75	1.977.816.533.853,00	2.437.774.008.865,00	2.183.175.644.400,00	2.288.698.853.621,00

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2020 diarahkan pada SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan tahun 2020 diarahkan pada penetapan kebijakan penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) terlihat seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
 Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan (2019)	Proyeksi / Target Pada Tahun Rencana (2020)	Proyeksi / Target Pada Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
3,1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	102.568.681.508,00	91.836.296.091,00	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.568.681.508,00	91.836.296.091,00	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3,2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	17.560.935.578,00	17.359.333.478,00	26.625.000.000,00	26.625.000.000,00	27.956.250.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.560.935.578,00	17.359.333.478,00	26.625.000.000,00	26.625.000.000,00	27.956.250.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	85.007.745.930,00	74.476.962.613,00	(26.625.000.000,00)	(1.625.000.000,00)	(2.956.250.000,00)